



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	4,012,335,036,317.18		
b. Belanja	Rp.	4,198,430,219,113.00		
		Surplus/(defisit)	Rp.	(186,095,182,795.82)
c. Pembiayaan				
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	563,493,624,089.61		
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	18,962,992,674.00		
		Pembiayaan Netto	Rp.	544,530,631,415.61

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.421.124.785,96 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	4,010,913,911,531.22
b. Realisasi	Rp.	4,012,335,036,317.18
Selisih	Rp.	1,421,124,785.96

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (589.962.230.657,83) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	4,788,392,449,770.83
b. Realisasi	Rp.	4,198,430,219,113.00
Selisih	Rp.	(589,962,230,657.83)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (591.383.355.443,79) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	(777,478,538,239.61)
b. Surplus/Defisit Tahun Berjalan	Rp.	(186,095,182,795.82)
Selisih	Rp.	(591,383,355,443.79)

- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 224.984.914.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	788,478,538,239.61
b. Realisasi	Rp.	563,493,624,089.61
Selisih	Rp.	(224,984,914,150.00)

- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.962.992.674,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	11,000,000,000.00
b. Realisasi	Rp.	18,962,992,674.00
Selisih	Rp.	7,962,992,674.00

- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (232.947.906.824,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	777,478,538,239.61
b. Realisasi	Rp.	544,530,631,415.61
Selisih	Rp.	(232,947,906,824.00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. SAL (Awal)	Rp.	449,958,890,339.61
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	449,958,890,339.61
SUB TOTAL		0.00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	358,435,448,619.79
SUB TOTAL		358,435,448,619.79
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0.00
e. Lain-lain	Rp.	0.00
f. SAL (Akhir)	Rp.	358,435,448,619.79

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	11,519,140,228,331.90
b. Jumlah kewajiban	Rp.	633,698,873,802.90
c. Jumlah ekuitas	Rp.	10,885,441,354,529.00

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp.	4,176,094,709,959.65
b. Beban	Rp.	3,666,525,624,393.02
c. Surplus/Defisit Operasional	Rp.	509,569,085,566.63
d. Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	55,801,900.00
e. Beban Luar Biasa	Rp.	42,642,342,345.00
f. Surplus/Defisit - LO	Rp.	466,982,545,121.63

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di BUD dan Bendahara per 1 Januari 2020	Rp.	449,958,890,339.61
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	862,172,727,503.18
c. Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan	Rp.	(1,059,267,910,299.00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	105,571,741,076.00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	0.00
f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara per 31 Desember 2020	Rp.	358,435,448,619.79
g. Saldo Akhir Kas Di BUD	Rp.	303,368,331,792.83
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	196,555,500.00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	465,000.00
j. Kas di Bendahara BLUD	Rp.	51,099,886,254.96
k. Kas Lainnya (Sisa Dana BOS)	Rp.	3,770,210,072.00
l. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp.	42,321,848.00
m. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020	Rp.	358,477,770,467.79

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	10,367,990,759,727.70
b. Surplus/Defisit - LO	Rp.	466,982,545,121.63
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp.	-
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	50,468,049,679.66
e. Ekuitas Akhir	Rp.	10,885,441,354,529.00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah).
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.

- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

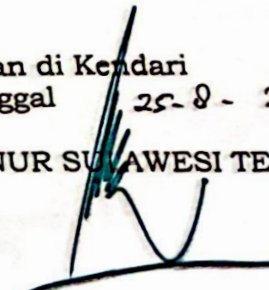
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25-8-2021

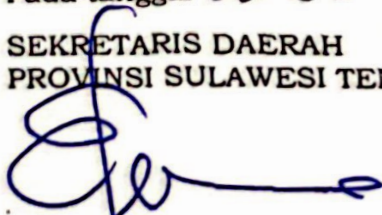
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 25-8-2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



NUR ENDANG ABBAS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR : 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 6-117/2021